



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK PEMBICARAAN
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 24 November 2015
W a k t u	: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna – Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.
Ketua Rapat	: Fadli Zon, S.S., M.Sc. : Wakil Ketua DPR RI Didampingi 1. Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI 2. Fahri Hamzah, S.E. : Wakil Ketua DPR RI
A c a r a	: Penetapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Dra. Damayanti, M.Si. Deputi Bidang Persidangan 2. Drs. Helmizar Kepala Biro Persidangan 3. Dr. Dewi Barliana S., M.Psi. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan 4. Dra. Mitra Anindyarina Kepala Bagian Persidangan Paripurna
Hadir Anggota	: 301 orang dan ijin 187 orang dari 557 orang Anggota

A. Pendahuluan

1. Rapat dibuka pukul 11.15 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI /Korpolkam, Yth. Bapak **Fadli Zon, S.S., M.Sc.**, dengan dihadiri oleh 301 orang dan ijin 187 orang dari 557 orang Anggota DPR RI.
2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah Penetapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
3. Rapat Paripurna menerima 9 (sembilan) pucuk surat yaitu:
 - 1) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-63/Pres/11/2015 tertanggal 13 November 2015, Perihal Penunjukan Wakil untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara Usul DPD RI.
 - 2) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-65/Pres/11/2015 tertanggal 4 November 2015, Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
 - 3) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-66/Pres/11/2015 tertanggal 13 November 2015, Perihal Penyampaian nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2015-2020.
 - 4) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-67/Pres/11/2015 tertanggal 13 November 2015, Perihal Penyampaian 2 (dua) nama Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020.
 - 5) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-68/Pres/11/2015 tertanggal 17 November 2015, Perihal Rencana Ratifikasi *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement of Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).
 - 6) Surat dari Presiden RI dengan Nomor R-69/Pres/11/2015 tertanggal 18 November 2015, Perihal Penyampaian nama-nama Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
 - 7) Surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/932/DPD RI/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, Perihal Penyampaian RUU.
 - 8) Surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/933/DPD RI/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan DPD RI.
 - 9) Surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/934/DPD RI/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, Perihal Penyampaian Pandangan Pendapat, dan Pertimbangan DPD RI.

Untuk surat yang **pertama** sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, sedangkan untuk surat **kedua sampai dengan kesembilan** sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Keputusan dan Kesimpulan

Rapat Paripurna Menyetujui Penetapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.

C. Penutup

Rapat ditutup pukul 11.20 WIB

Jakarta, 24 November 2015

KETUA RAPAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fadli Zon', written in a cursive style.

FADLI ZON, S.S., M.Sc.

**Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke-11
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016
Selasa, 24 November 2015**

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
H. YANDRI SUSANTO A-494/F-PAN/DAPIL:BANTEN II	<p>Terima kasih Pimpinan dan Seluruh Anggota DPR yang saya hormati, Terhadap agenda hari ini, penetapan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, mungkin kita tahu banyak badan atau komisi selama ini membebani anggaran negara Pimpinan dan kita tahu Pemerintah sedang memverifikasi beberapa badan dan komisi untuk dihapus. Apakah Bakamla ini juga tidak tumpang tindih dengan misalkan TNI Angkatan Laut, Polisi Air dan lain sebagainya, kita mungkin bagi saya sebenarnya Bakamla ini urgensinya belum terlalu penting kalau mau melihat dari fungsi-fungsi yang ada selama ini. Ada TNI Laut, ada juga Polisi Air dan sebagainya. Apakah misalkan kita memasuki agenda ini betul-betul sudah relevan dengan kepentingan sekarang atau apakah tidak lebih baik kita menaikkan atau kita meningkatkan peran dan fungsi Tentara Nasional Angkatan Laut dan badan-badan yang lain selama ini memang sudah terintergrasi dengan personal kelautan Pimpinan, jadi kami mempertanyakan apa urgensinya dan bagaimana semangat Pemerintah untuk meverifikasi bahkan menghapus beberapa badan dan komisi yang selama ini dianggap membebani keuangan negara, terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</p>	<p>KETUA RAPAT : Baik, terima kasih masukannya.</p>
Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A A-162/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JABAR VIII	<p>Pimpinan dan Anggota DPR yang saya hormati dan saya banggakan Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan penetapan maupun juga apa yang mau kita putuskan terkait dengan apa yang mau menjadi mitra kerja Bakamla RI ini, saya tidak mempersoalkan kepada siapa yang menjadi mitra kerja kita, tetapi saya ingin menegaskan bahwa <u>Bakamla seperti ini merupakan suatu badan yang sangat strategis dan penting sekali didalam upaya kita menjaga keamanan laut kita dari berbagai persoalan terkait dengan <i>illegal fishing, illegal logging</i> maupun juga <i>human trafficking</i>, dan lain sebagainya.</u> Jadi badan ini malah perlu menurut saya perlu kita perkuat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu badan yang betul-betul memiliki kinerja dan kemampuan, kapasitas yang kita harapkan dalam rangka menjadi keamanan laut kita. Namun Bapak Pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum undang-undang yang tadi Bapak Pimpinan sebutkan, itu ada undang terdahulu yang memang juga mengamankan untuk perlunya dibentuk suatu badan yang menjadi satu atap serta satu badan yang komprehensif bertanggungjawab kepada Presiden, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, dimana memang saya juga ikut serta didalam merumuskan undang-undang tersebut. Barangkali Bapak Pimpinan juga yang mengetahui ini, namun hingga sampai saat ini badan yang disebut adalah <i>sea and coast guard</i> atau penjagaan lautan pantai yang merupakan satu upaya kita untuk menyatukan satu atap dari berbagai lembaga yang ada di Republik ini, apakah Polo Air atau Bakamla, apakah Angkatan Laut, dan sebagainya, kita menghendaki ada suatu badan yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Internasional yaitu oleh IMO mengenai <i>sea and coast guard</i> ini, Tahun 2008 dan Undang-Undang ini mengamankan supaya 3 (tiga) tahun Pemerintah segera membentuk badan ini. Namun hingga sekarang, undang-undang ini tidak</p>	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
	<p>pernah dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan adanya undang-undang yang baru mengenai Kelautan yang tadi disampaikan tahun 2014 itu mengacu pada hal yang sama, maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan persoalan ini bagaimana kalau undang-undang ini tidak Pasal 276 khususnya Bab 17 mengenai <i>sea and coast guard</i>, sehingga oleh karenanya melalui Pimpinan agar Pemerintah untuk memperhatikan ini. Mana yang mau kita perkuat, apakah Bakorkamla atau mengenai <i>sea and coast guard</i> yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sebelumnya Tahun 2008 ini. Saya kira demikian Pimpinan, saya kira perlu kita perhatikan terkait dengan Undang-Undang yang kita putuskan bersama-sama, terima kasih.</p>	
<p>Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P A-308/F-PG/DAPIL: KALTIM</p>	<p>Pimpinan dan juga Anggota DPR yang saya hormati, Terkait dengan Bakamla, karena kita tahu bahwa luas daratan Indonesia itu hanya sepertiga dari lautannya dan memiliki garis pantai terpanjang ke-4 didunia. Apalagi karena kita semua ingin mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim, maka posisi Bakamla justru sebaliknya dari apa yang dikomentari dari rekan kami yang pertama, perlu diperkuat sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan, seluruh atau sebagian fungsi dari lebih atau belasan instansi yang saat ini berkecimpung dilaut, tadi disebutkan ada TNI Angkatan Laut, ada Polri, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga Kementerian Keuangan dalam hal ini terkait dengan bea cukai termasuk juga Bakamla, oleh sebab itu Pimpinan, disamping fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tindak kejahatan pencurian sumber daya alam di laut, perompakan, kejahatan transnasional, kecelakaan laut, dan macam-macam situasi yang terkait dengan kerusakan lingkungan yang membutuhkan perhatian yang luar biasa karena sudah banyak memakan korban dan juga pencemaran, maka kami justru ingin agar kedepan apabila Bakamla sudah menjadi mitra kerja Komisi I DPR RI, kita harus memperkuat posisinya dan hal ini hanya bisa terjadi jika peraturan perundang-undangan kita yang saat ini cenderung tumpang tindih karena sekitar ada 17 undang-undang yang mengatur laut ini, mungkin kita perlu nanti membuat suatu Undang-Undang Inisiatif tentang keamanan dan keselamatan laut. Mudah-mudahan dengan demikian maka situasi yang merugikan penegakan hukum dan juga situasi yang merugikan pengguna jasa kelautan bisa dihindari. Demikian Pimpinan, pendapat kami terima kasih. Assalamu'alaikum Wr.Wb.</p>	<p>KETUA RAPAT: Baik, terima kasih.</p>
<p>Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO A-364/F-P GERINDRA/DAPIL: JATIM I</p>	<p>Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Mohon maaf Pak, tadi sesuai apa yang disampaikan Pak Yosep, bahwa <i>sea and coast guard</i> ini perlu sekali untuk segera dibentuk dan kami lebih mengharapkan bahwa <i>sea and coast guard</i> membawahi Kamla dari sisi keamanan serta Basarnas dari sisi keselamatan yang ada dilaut. Jadi ada 2 (dua) yang perlu diamankan yaitu pengamanan dan penyelamatan, pengamanan di bawah Kamla sedangkan penyelamatan dibawah Basarnas. Dan untuk TNI itu pada posisi pertahanan yang ada dilaut, jadi itu yang kami usulkan terima kasih Pak.</p>	

Nama	Pernyataan	Tanggapan Ketua
KETUA RAPAT: Baik. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, pengganti Rapat Bamus DPR tanggal 19 November 2015 telah disepakati, jadi tentu saja ini masukan-masukan menjadi amanat undang-undang bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi Mitra Kerja Komisi I. kalau boleh saya lanjutkan sesuai dengan Peraturan DPR tentang TATIB Pasal 23 ayat (5) hasil Rapat Konsultasi disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan. Sidang Dewan yang terhormat, apakah bisa kami tanyakan pada Sidang Dewan yang terhormat ini, apakah Penetapan Mitra Kerja tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan. Setuju, ketok palu. Terima kasih.		
Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A A-162/F-PDI PERJUANGAN/ DAPIL: JABAR VIII	Pimpinan, Terkait dengan pemberitaan mass media yang berlangsung akhir-akhir ini, dimana sangat membawa dan memberikan suatu dampak yang sangat negatif terhadap citra kelembagaan Dewan karena ini suatu persoalan yang saya kira perlu mendapatkan klarifikasi yang tuntas, maka saya ingin menyatakan dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama rasa keprihatinan yang mendalam karena persoalan yang muncul akhir-akhir ini, terutama terkait dengan kredibilitas Dewan bahkan tidak hanya kredibilitas lembaga legislatif tetapi juga kredibilitas lembaga eksekutif terutama pemerintah, maka melalui Pimpinan, saya mohon dengan sangat supaya persoalan ini segera dituntaskan terutama melalui MKD yang kita percaya untuk mengklarifikasi dan memverifikasi mengenai benar atau tidaknya laporan dari Kementerian ESDM terkait dengan pengaduan salah seorang dari Anggota kita yang telah tertulis didalam mass media tersebut. Oleh karena itu Pimpinan, saya mohon pada kesempatan yang berbahagia ini dengan hormat kepada MKD untuk betul-betul menjaga dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi terhadap kredibilitas lembaga legislasi yang kita hormati ini. Saya kira demikian Pimpinan, ini perlu kita perhatikan dengan baik, perlu kita untuk perhatikan dan kita jaga supaya pelaksanaan didalam verifikasi berlangsung didalam dengan baik, terima kasih Pimpinan.	KETUA RAPAT : Terima kasih, atas masukannya, saya kira sesuai mekanisme yang berlaku diserahkan kepada MKD.
JOHNNY G PLATE, S.E A-27/F-P NASDEM/DAPIL: NTT I	Menggarisbawahi dan mendukung yang rekan tadi sampaikan, agar MKD bekerja dengan <i>full disclosure</i> , sehingga marwah dan martabat lembaga ini bisa kita jaga. Terima kasih	KETUA RAPAT : Terima kasih.

Jakarta, 24 November 2015
 KEPALA BIRO PERSIDANGAN,



Drs. HELMIZAR
 NIP. 196407191991031001